

---

## Strategi Program Pemberdayaan Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat: Analisis Maqashid Syariah di Kepenghuluan Panca Mukti Kabupaten Rokan Hilir

Lailatul Husna<sup>1)</sup>, M. Kamal Hadi<sup>2)\*</sup>

<sup>1,2)</sup> Institut Agama Islam Rokan, Indonesia

\*Penulis Koresponden:

Email : [lailatulhusna128@gmail.com](mailto:lailatulhusna128@gmail.com)  
[kamal.kh@mail.com](mailto:kamal.kh@mail.com)

---

### Abstrak

*Community Development Programs (PPD) merupakan inisiatif strategis dalam memperkuat ekonomi pedesaan berbasis prinsip ekonomi Islam dan tujuan al-falah. Namun, dampak ekonomi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat masih terbatas, terutama di daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi seperti Kabupaten Rokan Hilir yang mencapai 53,04 persen pada 2023. Kondisi ini menunjukkan perlunya analisis mendalam terhadap mekanisme implementasi dan hambatan yang muncul. Penelitian ini bertujuan mengkaji strategi pelaksanaan PPD dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat di Kepenghuluan Panca Mukti, Kecamatan Bagan Sinembah Raya, serta mengidentifikasi hambatan dan merumuskan rekomendasi strategis berkelanjutan. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui penelitian lapangan enam bulan, data dikumpulkan melalui observasi partisipatif, wawancara semi-terstruktur dengan 12 informan, dan dokumentasi. Analisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman melalui reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dengan triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPD dijalankan pada lima domain utama menggunakan empat strategi penyuluhan, dengan BUMDes sebagai motor ekonomi yang menghasilkan laba sekitar Rp1.000.000 per bulan dari modal awal Rp90.000.000. Meskipun mencerminkan maqashid syariah (hifz an-nafs dan hifz al-mal), hambatan signifikan tetap muncul, seperti keterbatasan kapasitas SDM, partisipasi rendah, infrastruktur belum memadai, dan manajemen BUMDes yang lemah. Kesuksesan PPD membutuhkan penguatan SDM, peningkatan partisipasi, optimalisasi modal, dan integrasi sistematis prinsip ekonomi Islam.*

**Kata kunci:** Program Pemberdayaan Desa, Ekonomi Syariah, Maqashid Syariah, Kesejahteraan Masyarakat, BUMDes.

### Abstract

*Community Development Programs (PPD) represent a strategic initiative to strengthen rural economies based on Islamic economic principles and the goal of al-falah. However, their economic impact on improving community welfare remains limited, particularly in regions with high poverty levels such as Rokan Hilir Regency, which reached 53.04 percent in 2023. This condition highlights the need for an in-depth analysis of implementation mechanisms and emerging challenges. This study aims to examine the implementation strategies of PPD in improving the economic welfare of communities in Kepenghuluan Panca Mukti, Bagan Sinembah Raya District, as well as to identify obstacles and formulate sustainable strategic recommendations. Using a descriptive qualitative approach through six months of field research, data were collected through participatory observation, semi-structured interviews with 12 informants, and documentation. Data analysis employed the interactive model of Miles and Huberman, consisting of data reduction, data display, and conclusion drawing with triangulation. The findings show that PPD is implemented across five main domains using four extension strategies, with BUMDes functioning as the economic engine that generates approximately IDR 1,000,000 profit per month from an initial capital of IDR 90,000,000. Although reflecting dimensions of maqashid sharia (hifz an-nafs and hifz al-mal), significant obstacles persist, including limited human resource capacity, low community participation, inadequate infrastructure, and weak BUMDes management. The success of PPD requires strengthened human resources, increased participation, optimized capital management, and systematic integration of Islamic economic principles.*

**Keywords:** Community Development Program, Islamic Economics, Maqashid Syariah, Community Welfare, Village Land.

---

## PENDAHULUAN

Program pembangunan berbasis masyarakat menjadi salah satu pendekatan kunci yang digunakan Indonesia untuk memperkuat perekonomian desa, terutama melalui penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam berbagai inisiatifnya (Sahabudin et al., 2024). Dalam pandangan ini, pembangunan ekonomi tidak hanya diukur dari capaian materi, tetapi juga dari kemampuan menciptakan kesejahteraan yang inklusif melalui nilai demokrasi, gotong royong, serta solidaritas sosial (Sany, 2019). Konsep *al-falah* menegaskan peran manusia sebagai penjaga bumi yang berkewajiban mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat melalui aktivitas ekonomi yang beretika dan bertanggung jawab.

Walaupun telah dilaksanakan program-program terarah seperti Program Pemberdayaan Desa (PPD) serta pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), sebagian daerah pedesaan termasuk Kabupaten Rokan Hilir, masih berhadapan dengan persoalan mendasar seperti tingginya angka kemiskinan serta ketidakstabilan pertumbuhan ekonomi (Badan Pusat Statistik, 2024). Kendati program tersebut membawa potensi besar bagi penguatan ekonomi lokal, temuan empiris menunjukkan adanya keterbatasan dalam kapasitas sumber daya manusia, pengelolaan yang belum optimal, serta efektivitas kelembagaan yang masih perlu ditingkatkan secara signifikan (Budiyanto & Purnomo, 2025).

Konteks tersebut memperlihatkan pentingnya urgensi akademik dan praktis. Sejumlah penelitian (Ihwan & Fadli, 2025; Natoil et al., 2025) menemukan bahwa implementasi kebijakan tidak selalu sejalan dengan hasil di lapangan, di mana peningkatan aktivitas ekonomi belum sepenuhnya mampu menekan kemiskinan secara sebanding. Kondisi ini mengindikasikan perlunya pendekatan pemberdayaan yang lebih adaptif, pengembangan kapasitas masyarakat, serta penyusunan program yang lebih partisipatif. Integrasi prinsip syariah, kearifan lokal, dan evaluasi berkelanjutan menjadi tantangan utama dalam merancang pembangunan desa yang lebih komprehensif (Kurnia & Insani, 2020).

Penelitian ini diarahkan untuk mengkaji secara mendalam strategi PPD dalam meningkatkan tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat di Kepenghuluan Panca Mukti, Kecamatan Bagan Sinembah Raya, Kabupaten Rokan Hilir. Fokus utamanya adalah melihat bagaimana intervensi pemberdayaan memengaruhi kemampuan ekonomi warga, mengidentifikasi hambatan yang muncul, serta merumuskan rekomendasi strategis yang mampu menghasilkan dampak yang efektif dan berkelanjutan bagi pembangunan desa.

Artikel ini memberikan kontribusi penting dengan menghadirkan analisis empiris mengenai keunggulan dan keterbatasan PPD dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Temuan-temuan tersebut diharapkan dapat memperkaya diskursus akademik serta menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan, praktisi lapangan, dan para peneliti dalam merancang strategi yang lebih tepat untuk menghubungkan gagasan teoritis dengan realitas ketahanan masyarakat desa.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) guna menelaah secara mendalam bagaimana strategi Program Pemberdayaan Desa (PPD) dijalankan dalam meningkatkan ekonomi masyarakat. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai dinamika sosial, budaya, serta struktur kelembagaan yang menyertai pelaksanaan program pemberdayaan melalui observasi langsung dan interaksi intensif dengan berbagai aktor kunci (Sugiyono, 2018). Desain penelitian deskriptif-kualitatif digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena secara cermat, sehingga makna, proses, dan strategi pemberdayaan dapat dipahami secara lebih utuh.

Kegiatan penelitian dilakukan di Kepenghuluan Panca Mukti, Kecamatan Bagan Sinembah Raya, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Lokasi ini dipilih karena memiliki karakteristik

sosial-ekonomi yang relevan di antaranya tingkat kemiskinan yang mencapai 53,04 persen pada tahun 2023 serta kondisi pertumbuhan ekonomi yang tidak stabil sehingga menjadi tempat yang tepat untuk menilai kinerja program pemberdayaan desa. Penelitian berlangsung selama enam bulan dengan mencakup tahap persiapan, penyusunan proposal, pengumpulan data lapangan, hingga penulisan laporan akhir.

Populasi penelitian meliputi seluruh unsur yang terlibat dalam pelaksanaan PPD, antara lain perangkat pemerintahan desa, pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), peserta program, serta masyarakat umum di Panca Mukti. Karena penelitian ini bersifat kualitatif dengan orientasi eksploratif, pemilihan informan dilakukan melalui teknik purposive sampling, yaitu memilih partisipan berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan kebutuhan penelitian, sehingga setiap informan benar-benar memiliki pemahaman terkait topik penelitian (Arikunto, 2006; Patton, 2015). Jumlah informan ditentukan berdasarkan prinsip saturasi data, yakni kondisi ketika informasi baru tidak lagi muncul. Total 12 informan terlibat, terdiri atas informan kunci (Penghulu, Sekretaris Desa, dan Direktur BUMDes), informan utama (pekerja BUMDes, kader kesehatan, dan anggota PKK), serta informan tambahan dari kalangan masyarakat yang mengikuti kegiatan pemberdayaan.

Teknik pengumpulan data menggunakan tiga metode utama: observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi dilaksanakan secara partisipatif untuk melihat langsung berbagai aktivitas pemberdayaan, pengelolaan BUMDes, kegiatan kelompok PKK, serta pelaksanaan program kesehatan di lapangan (Nawawi, 2015). Wawancara semi-terstruktur digunakan dengan daftar pertanyaan yang telah disiapkan, namun tetap memberikan ruang kepada responden untuk menjelaskan pengalaman mereka secara bebas, sementara peneliti dapat mengembangkan pertanyaan lanjutan sesuai konteks pembicaraan (Kriyantono, 2014; Rahmawati et al., 2024). Dokumentasi dilakukan melalui pengumpulan berbagai arsip, foto, laporan kegiatan, dan dokumen administratif desa, termasuk profil wilayah serta struktur pemerintahan (Fadhallah, 2020).

Analisis data dilakukan menggunakan pendekatan interaktif Miles dan Huberman yang mencakup reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan (Qomaruddin & Sa'diyah, 2024). Pada tahap reduksi data, informasi mentah dari wawancara, observasi, dan dokumen diseleksi, disederhanakan, dan difokuskan agar menghasilkan data yang relevan dan bermakna. Selanjutnya, penyajian data dilakukan dengan menyusun informasi terpilih dalam bentuk narasi, tabel, maupun diagram agar memudahkan identifikasi pola dan keterkaitan temuan. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan, yang dilakukan dengan menafsirkan pola, mengidentifikasi tema utama, serta melakukan verifikasi melalui triangulasi dan member checking untuk menjamin keabsahan data. Ketiga proses ini berlangsung secara terus-menerus dan saling berkaitan sepanjang penelitian, sehingga menghasilkan pemahaman yang mendalam dan selaras dengan kondisi nyata di lapangan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menemukan bahwa Program Pemberdayaan Desa (PPD) di Kepenghuluan Panca Mukti berjalan melalui lima ranah utama, yakni pemerintahan desa, kesehatan, kelembagaan, teknologi, dan ekonomi. Pada aspek pemerintahan desa, kegiatan yang digerakkan meliputi pelatihan peningkatan kapasitas aparatur dan pelatihan pengelolaan keuangan desa guna memperkuat kualitas tata kelola dan pembangunan. Di bidang kesehatan, layanan Posyandu rutin setiap bulan diberikan bagi balita, ibu hamil, dan lanjut usia, disertai pembinaan kader kesehatan.

Dalam bidang kelembagaan, pemberdayaan masyarakat dijalankan melalui kegiatan PKK, termasuk penanaman tanaman toga sebagai sarana edukasi mengenai pemanfaatan tanaman obat. Di ranah teknologi, pemanfaatan aplikasi Mesin Si Koncang (Sistem Informasi Kepenghuluan Nan Canggih) menjadi langkah awal menuju digitalisasi layanan desa meskipun belum berfungsi secara optimal. Pada dimensi ekonomi, BUMDes Maju Bersama menjadi motor

penggerak dengan unit usaha penyewaan teratak yang mulai beroperasi tahun 2023, berbekal modal awal Rp 90.000.000 dan menghasilkan laba bersih sekitar Rp 1.000.000 setiap bulan.

Pelaksanaan PPD mengikuti empat strategi utama, yaitu kontak langsung (*direct contact*), demonstrasi proses, demonstrasi hasil, dan paksaan sosial (Farida, 2011). Strategi kontak langsung dilakukan melalui seminar, workshop, serta pelatihan sebagai media penyampaian pengetahuan. Demonstrasi proses diterapkan melalui pendampingan praktik, seperti pelatihan pembuatan kue, kerajinan tangan, dan bimbingan teknis pengelolaan BUMDes. Demonstrasi hasil memperlihatkan wujud nyata dari keterampilan yang telah dipelajari, di mana warga dapat menghasilkan serta memasarkan produk kerajinan mereka. Sementara itu, paksaan sosial digunakan sebagai bentuk dorongan kolektif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan pemberdayaan.

Hambatan yang muncul dalam pelaksanaan program dapat dikategorikan ke dalam empat aspek. Pertama, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, terutama terkait kemampuan pengelolaan BUMDes dan literasi teknologi. Kedua, tingkat partisipasi masyarakat yang masih rendah dalam mengikuti kegiatan pemberdayaan. Ketiga, kurangnya infrastruktur pendukung seperti jaringan internet yang belum merata. Keempat, persoalan manajerial dalam operasional BUMDes, termasuk rendahnya pendapatan serta kesulitan memperoleh tenaga pengelola yang kompeten. Walaupun BUMDes telah berjalan sejak 2023, dampaknya terhadap peningkatan ekonomi warga masih belum signifikan.

PPD juga mencerminkan pencapaian tujuan maqashid syariah melalui beberapa indikator. Pertama, peningkatan kualitas keagamaan masyarakat melalui pelatihan yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam. Kedua, perbaikan tata kelola pemerintahan melalui pelatihan aparatur desa. Ketiga, pemerataan distribusi manfaat program, baik melalui BUMDes maupun layanan kesehatan yang inklusif. Keempat, terbukanya kesempatan bagi seluruh warga untuk terlibat dalam kegiatan pemberdayaan. Kelima, terciptanya kondisi sosial yang lebih aman dan sejahtera berkat peningkatan kesejahteraan masyarakat (Al-Haritsi, 2006; Kurnia & Insani, 2020).

### **Efektivitas Program Pemberdayaan Desa dalam Konteks Teori**

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pelaksanaan PPD di Kepenghuluan Panca Mukti berjalan secara komprehensif dengan mencakup lima bidang strategis. Temuan ini selaras dengan konsep pemberdayaan masyarakat yang menekankan pendekatan multidimensi (Kadir & Rahman, 2022). Bukti empiris sebelumnya mengungkap bahwa kontribusi BUMDes terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat masih tergolong rendah, yaitu hanya memberikan pengaruh positif sebesar 28,5 persen (Yusdayanti et al., 2025). Situasi ini tercermin pula di Kepenghuluan Panca Mukti, di mana BUMDes baru mampu mencatatkan laba sekitar Rp 1.000.000 per bulan, sehingga belum mampu memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat.

Empat strategi yang diterapkan kontak langsung, demonstrasi proses, demonstrasi hasil, serta paksaan sosial sejalan dengan prinsip pembangunan komunitas yang menekankan pentingnya partisipasi aktif (Farida, 2011; Kayupa et al., 2025). Kendati demikian, keberhasilan pendekatan tersebut sangat ditentukan oleh mutu pelaksanaannya dan tingkat keterlibatan warga desa. Sejumlah penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa hambatan utama pemberdayaan terletak pada dominasi elit lokal dalam proses pengambilan keputusan, lemahnya mekanisme komunikasi, serta rendahnya partisipasi masyarakat (Kayupa et al., 2025). Kondisi serupa tampak di lokasi penelitian, di mana penggunaan paksaan sosial masih diperlukan untuk mendorong partisipasi, menandakan bahwa kemampuan masyarakat untuk terlibat secara mandiri dan sukarela dalam kegiatan pemberdayaan masih terbatas.

### **Sumber Daya Manusia sebagai Faktor Kritis**

Keterbatasan dalam kapasitas sumber daya manusia menjadi hambatan utama yang menghambat efektivitas program. Permasalahan pengelolaan SDM di tingkat pemerintahan desa

umumnya berkaitan dengan lemahnya kemampuan manajerial dan teknis, tidak tersedianya pelatihan yang berkesinambungan, serta adanya sikap keberatan terhadap perubahan (Muhidin et al., 2025). Di Kepenghuluan Panca Mukti, persoalan tersebut tampak nyata pada pengelolaan BUMDes yang membutuhkan aparatur dengan kemampuan akuntansi, manajemen keuangan, dan literasi digital yang belum dimiliki secara memadai. Studi yang dilakukan oleh Lariwu (2023) di Desa Londi juga menegaskan bahwa rendahnya kualitas SDM merupakan faktor krusial yang menghambat efektivitas pelaksanaan program pemberdayaan. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas harus dilakukan melalui program pengembangan kompetensi yang sistematis dan berjangka panjang, bukan sekadar pelatihan sesekali.

### **Partisipasi Masyarakat dan Kesadaran Kolektif**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya tingkat kesadaran dan keterlibatan warga menjadi hambatan penting dalam pelaksanaan program, sehingga penggunaan paksaan sosial menjadi salah satu pendekatan yang ditempuh. Situasi ini menggambarkan adanya ketidaksesuaian antara tujuan program pemberdayaan dengan kondisi nyata partisipasi masyarakat di tingkat akar rumput. Kayupa et al. (2025) menjelaskan bahwa partisipasi yang minim umumnya dipicu oleh kurangnya pemahaman mengenai urgensi keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan serta terbatasnya informasi yang diterima masyarakat. Dalam pandangan ekonomi syariah, prinsip al-falah menekankan bahwa masyarakat harus terlibat secara aktif dan sadar sebagai pelaku utama pembangunan, bukan sekadar penerima manfaat (Al-Haritsi, 2006; Kurnia & Insani, 2020). Penggunaan paksaan sosial, meskipun dapat berfungsi dalam konteks lokal tertentu, menunjukkan bahwa strategi komunikasi dan penyuluhan perlu diperkuat agar terbentuk kesadaran partisipatif dari dalam diri masyarakat. Pendekatan pemberdayaan yang berkelanjutan memerlukan perubahan pola pikir dan budaya, bukan hanya bentuk kepatuhan yang bersifat formal atau mekanis.

### **Perspektif Ekonomi Syariah dan Pencapaian Maqashid**

Program PPD menunjukkan keterkaitan yang jelas dengan prinsip-prinsip maqashid syariah, khususnya dalam realisasi *hifz an-nafs* melalui berbagai inisiatif peningkatan layanan kesehatan serta *hifz al-mal* melalui program penguatan ekonomi masyarakat. Meskipun demikian, capaian tersebut masih bersifat parsial dan berkembang secara bertahap. Kajian Zaini et al. (2025) menegaskan bahwa lima dimensi pokok maqashid syariah pada dasarnya dapat diwujudkan melalui program pemberdayaan, tetapi dimensi tambahan yang diajukan Al-Qardhawi, yaitu *hifz al-bi'ah* (perlindungan lingkungan), masih sering terabaikan dalam implementasi. Kondisi serupa juga terlihat di Kepenghuluan Panca Mukti, di mana fokus program masih dominan pada aspek material-ekonomis, sementara dimensi spiritual, intelektual, dan lingkungan belum memperoleh porsi penguatan yang memadai.

Prinsip kesalehan umat yang menjadi landasan etis dalam pemberdayaan masyarakat juga memerlukan mekanisme integrasi yang lebih sistematis antara nilai-nilai etika bisnis Islami dan praktik operasional di lapangan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa penerapan maqashid syariah dalam program pemberdayaan ekonomi berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, namun efektivitasnya sangat bergantung pada dukungan kelembagaan dan sinergi antarpemangku kepentingan (Adesty et al., 2025). Temuan tersebut selaras dengan kebutuhan di Kepenghuluan Panca Mukti, di mana kolaborasi antara pemerintah desa, lembaga keuangan syariah, dan organisasi masyarakat sipil harus diperkuat guna mengoptimalkan dampak transformasional program PPD.

### **Implikasi Teoritis dan Praktis**

Secara teoretis, penelitian ini memperkaya literatur mengenai dinamika implementasi pemberdayaan desa yang bersifat multidimensional dalam kerangka ekonomi syariah. Temuan menunjukkan bahwa kesenjangan antara tahap perencanaan dan pelaksanaan masih cukup mencolok, terutama terkait kualitas sumber daya manusia, kapasitas masyarakat dalam

mengelola program, serta keberlanjutan mekanisme yang diterapkan. Ketidaksinkronan tersebut menegaskan bahwa model pemberdayaan desa tidak hanya membutuhkan instrumen kebijakan yang komprehensif, tetapi juga memerlukan sistem implementasi yang adaptif dan berbasis kebutuhan lokal.

Dari sisi praktis, beberapa implikasi strategis dapat ditarik. Pertama, peningkatan kualitas SDM perlu direvitalisasi melalui program pelatihan berkelanjutan, pendampingan intensif, dan penyediaan sistem insentif yang terukur sehingga mampu mendorong motivasi serta profesionalisme pelaksana program. Kedua, pengembangan mekanisme komunikasi dua arah perlu diperkuat untuk membangun partisipasi masyarakat yang lebih intrinsik, tidak sekadar bersifat formalis. Ketiga, optimalisasi permodalan dan diversifikasi usaha BUMDes menjadi penting untuk meningkatkan kontribusi ekonomi desa sekaligus menekan ketergantungan pada satu sumber pendapatan. Keempat, integrasi nilai-nilai syariah dalam setiap aspek operasional program harus diperkuat agar proses pemberdayaan tidak hanya menghasilkan capaian material, tetapi juga mencerminkan prinsip etika, keadilan, dan keberlanjutan yang menjadi landasan ekonomi syariah.

### **Keterbatasan dan Arah Penelitian Lanjutan**

Penelitian ini memiliki beberapa batasan yang perlu diperhatikan. Pertama, data yang digunakan bersifat cross-sectional, sehingga tidak mampu menangkap dinamika perubahan maupun dampak jangka panjang dari program yang dikaji. Untuk memperoleh gambaran yang lebih mendalam mengenai keberlanjutan dan akumulasi efek program, diperlukan studi longitudinal pada penelitian berikutnya. Kedua, evaluasi efektivitas program dalam penelitian ini masih dominan menggunakan analisis kualitatif-deskriptif tanpa dukungan indikator kuantitatif yang terukur. Penelitian lanjutan idealnya mengadopsi pendekatan mixed-methods dengan memasukkan metrik objektif agar penilaian efektivitas menjadi lebih holistik dan akurat.

Ketiga, cakupan penelitian yang terbatas pada satu wilayah membuat generalisasi temuan menjadi kurang optimal. Kajian komparatif di beberapa lokasi dengan karakter sosial dan budaya yang berbeda akan memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai faktor determinan keberhasilan program pemberdayaan. Terakhir, penelitian ini belum menggali secara mendalam kontribusi aktor eksternal, seperti organisasi non-pemerintah, lembaga keuangan, maupun institusi akademik, dalam mendukung implementasi program. Aspek tersebut merupakan ruang penting yang perlu dieksplorasi dalam penelitian mendatang untuk memperkaya analisis mengenai ekosistem pemberdayaan desa.

## **KESIMPULAN**

Program Pemberdayaan Desa (PPD) di Kepenghuluan Panca Mukti dilaksanakan melalui lima ranah prioritas, yaitu tata kelola pemerintahan, kesehatan, penguatan kelembagaan masyarakat, pemanfaatan teknologi, dan pengembangan ekonomi. Implementasinya memanfaatkan empat pendekatan—kontak langsung, demonstrasi proses, demonstrasi hasil, serta paksaan sosial—dan menunjukkan kesesuaian dengan prinsip maqashid syariah. Meskipun demikian, dampak ekonomi yang dihasilkan masih relatif kecil; BUMDes hanya mampu memperoleh laba sekitar Rp 1.000.000 per bulan meski memiliki modal awal Rp 90.000.000.

Sejumlah hambatan utama menyebabkan hasil program belum optimal, antara lain keterbatasan kompetensi sumber daya manusia, minimnya partisipasi dan kesadaran masyarakat, keterbatasan sarana pendukung, serta problem manajemen operasional BUMDes. Temuan tersebut memperlihatkan adanya jarak yang cukup besar antara perencanaan program yang bersifat komprehensif dan pelaksanaannya dalam mendorong peningkatan kesejahteraan ekonomi yang berkelanjutan.

Secara teoretis, penelitian ini memperkaya kajian pemberdayaan desa berbasis ekonomi syariah dengan menyoroti kompleksitas pelaksanaan program multidimensi dan kebutuhan investasi SDM yang berkesinambungan. Dari sudut pandang praktis, diperlukan beberapa langkah perbaikan, meliputi: (1) penguatan kapasitas aparatur melalui pelatihan terstruktur; (2) penyusunan strategi komunikasi yang lebih efektif guna meningkatkan kesadaran warga; (3) optimalisasi modal dan perluasan unit usaha BUMDes; serta (4) pengembangan kerja sama lintas lembaga, termasuk dengan institusi keuangan syariah.

Untuk penelitian ke depan, direkomendasikan: (1) pelaksanaan studi longitudinal guna mengamati dampak jangka panjang terhadap indikator kesejahteraan yang terukur; (2) penyusunan kerangka evaluasi yang mengintegrasikan maqashid syariah dengan ukuran ekonomi konvensional; (3) penelitian komparatif di berbagai wilayah untuk memperluas generalisasi; serta (4) eksplorasi model pemberdayaan baru yang menggabungkan teknologi digital dengan prinsip ekonomi syariah dalam rangka memperkuat keberlanjutan sosial-ekonomi pedesaan.

## REFERENSI

- Adesty, R., Azzahra, S., & Aisyah, S. (2025). Maqashid Syariah dalam Perspektif Ekonomi Islam: Konsep, Peran, dan Implementasi. *KAP (Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen)*, 3, 274–284. <https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jiem.v3i6.5194>
- Al-Haritsi, J. B. A. (2006). *Fikih Ekonomi Umar Bin Al-Khathab* (M. Ihsan (ed.); A. S. Zamakhsyari (trans.)). Pustaka Al-Kautsar.
- Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi VI*. Rineka Cipta.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Ekonomi Indonesia Triwulan IV-2023 Tumbuh 5,04 Persen (y-on-y)*. <https://www.worldbank.org/en/research/commodity-markets>
- Budiyanto, I., & Purnomo, D. (2025). *EFISIENSI KELEMBAGAAN BUMDES DI KABUPATEN KLATEN DENGAN PENDEKATAN DATA ENVELOPMENT ANALYSIS (DEA)*. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*. <https://doi.org/https://doi.org/10.31539/costing.v8i3.15425>
- Fadhallah. (2020). *Wawancara*. UNJ PRESS.
- Farida, A. S. (2011). *Sistem Ekonomi Indonesia*. Pustaka Setia.
- Ihwan, A. T., & Fadli, A. F. (2025). PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DALAM MENGATASI PENGANGGURAN MELALUI BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR BERBASIS EKONOMI ISLAM. *EKSYA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Syariah*, 2, 22–31. <https://jurnal.iaih.ac.id/index.php/EKSYA/article/view/1904/479>
- Kadir, R., & Rahman, S. (2022). Dampak Covid-19 Terhadap Kinerja Keuangan Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah Di Indonesia. *Akasyah Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Audit Syariah*, 1(2), 16–23. <https://doi.org/10.58176/akasyah.v1i2.370>
- Kayupa, O. O., Guampe, F. A., Hengkeng, J., & Balo, M. J. (2025). Tantangan dan Peluang Implementasi Perencanaan Pembangunan Partisipatif Desa-Desa di Indonesia. *SIMO (Studi Ilmu Manajemen Dan Organisasi)*, 6, 187–199. <https://doi.org/https://doi.org/10.35912/simo.v6i1.3483>
- Kriyantono, R. (2014). *Riset Komunikasi*. Kencana.
- Kurnia, A., & Insani, S. (2020). PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH MELALUI PROGRAM KOTAKU (KOTA TANPA KUMUH). *Mu'amalatuna (Jurnal Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Lampung)*, 43–61. <https://www.journal.uml.ac.id/index.php/MT/article/view/291/228>
- Muhidin, Y., Afandi, A., A, S. F., A, N. N. P., & Rizkyanti. (2025). Tantangan dan Peluang Pengembangan Sumber Daya Manusia di Desa Cileleuy. *Pusat Publikasi Ilmu Manajemen*, 3, 89–101. <https://doi.org/https://doi.org/10.59603/ppiman.v3i1.627>
- Natoil, Linanjung, Y. A., & Tamrin, M. (2025). PENGARUH PENGELOLAAN BUMDES DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DESA. *CAPITAL (Kebijakan Ekonomi, Manajemen & Akuntansi)*, 7, 125–136. <https://doi.org/https://doi.org/10.33747/capital.v7i1.297>
- Nawawi, H. (2015). *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Gajah Mada University Press.

- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative Research & Evaluation Methods: Integrating Theory and Practice*. SAGE Publications, Inc. <https://books.google.co.id/books?id=-CM9BQAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false>
- Qomaruddin, & Sa'diyah, H. (2024). Kajian Teoritis tentang Teknik Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles dan Huberman. *NURIS (Journal of Management, Accounting, and Administration)*, 1, 77–84. <https://doi.org/https://doi.org/10.52620/jomaa.v1i2.93>
- Rahmawati, A., Halimah, N., Karmawan, K., & Setiawan, A. A. (2024). Optimalisasi Teknik Wawancara Dalam Penelitian Field Research Melalui Pelatihan Berbasis Participatory Action Research Pada Mahasiswa Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang. *Abdimas Prakasa Dakara*, 4, 135–142. <https://doi.org/https://doi.org/10.37640/japd.v4i2.2100>
- Sahabudin, Sanwani, & Suandi. (2024). Strategi Program Pemberdayaan Desa dalam Mengembangkan Ekonomi Masyarakat Desa Tetebatu. *Reform (Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya)*, 7, 26–34. <https://doi.org/https://doi.org/10.70004/reform.v7i01.78>
- Sany, U. P. (2019). Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Al Qur'an. *Jurnal Ilmu Dakwah*, 39, 32–44. <https://doi.org/https://doi.org/10.21580/jid.v39.1.3989>
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Manajemen*. Alfabeta.
- Yusdayanti, N. P., Fariadi, H., & Nurmalia, A. (2025). Efektivitas Penyaluran Dana Desa Terhadap Kinerja Bumdes Usahatani Kelapa Sawit Di Desa Tumbuk Kecamatan Pagar Jati Kabupaten Bengkulu Tengah. *Journal Of Multidisciplinary Research*, 1, 71–76. <https://doi.org/https://doi.org/10.70963/jmr.v1i2>